

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konvergensi merupakan kondisi yang mendeskripsikan semakin kecilnya kesenjangan suatu variabel antar wilayah dalam periode tertentu. Semakin kecilnya kesenjangan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Kondisi konvergen juga mengandung arti bahwa terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi selama periode tertentu. Tingkat pendapatan yang dimaksud dalam teori konvergensi adalah pendapatan per kapita (Barro dan Martin, 1992).

Perbedaan karakteristik struktur ekonomi dan potensi di setiap wilayah tentunya sangat berpengaruh pada tingginya laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita (Barro dan Martin, 2004). Perbedaan struktur ekonomi dan potensi dalam setiap wilayah disebabkan adanya keragaman daerah yang sangat tinggi meliputi, sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi, sosial, adat istiadat, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, letak geografis dan faktor lainnya. Perbedaan tersebut, tentunya akan dapat menimbulkan adanya ketimpangan pendapatan antar daerah yang dapat mempengaruhi tumbuh cepat dan lambatnya pembangunan daerah.

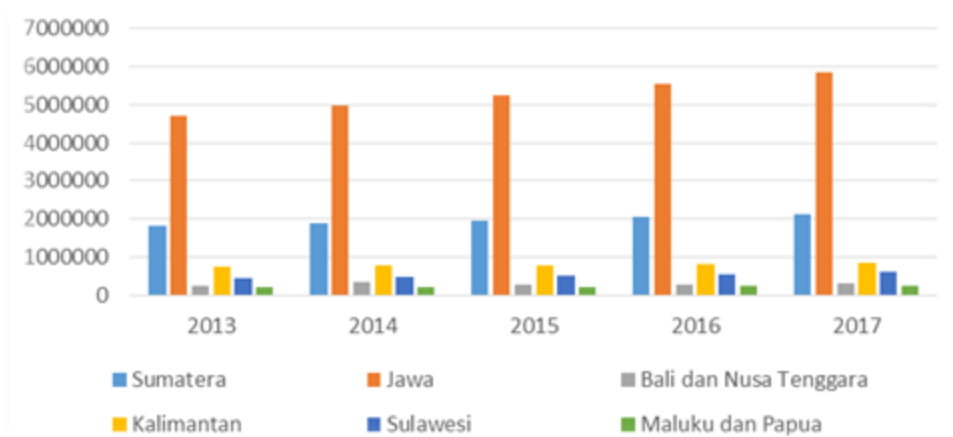
Perubahan sistem pembangunan ekonomi nasional di era pasca Orde Baru tentunya juga berdampak pada pembangunan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia. Pada masa Orde Baru sistem pengelolaan struktur ekonomi diatur penuh oleh kewenangan pusat (sentralisasi). Setelah Orde Baru sistem pembangunan ekonomi nasional berganti menjadi desentralisasi yang

memberikan hak dan kewenangan daerah untuk mengelola struktur perekonomian secara mandiri, yang bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata, namun dalam penerapannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan dan tujuan utama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Bergantinya sistem pembangunan nasional tentunya berdampak pada arah dan kebijakan pembangunan perekonomian. Sebab, arah pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh sistem kebijakan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mendorong GNP per kapita atau pendapatan masyarakat naik dalam periode waktu yang berkelanjutan (Todaro, 2013). Kebijakan pembangunan pada aspek perekonomian dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil pembangunan dari aspek perekonomian tersebut masih belum dapat dirasakan secara merata oleh lapisan masyarakat.

Pada awal pembangunan masing-masing seluruh wilayah cenderung memiliki pola pembangunan ekonomi yang sama yaitu perkembangan pendapatan perkapita kearah positif dan terus naik. Namun, setelah beberapa periode waktu kemudian terjadi ketimpangan pendapatan antar daerah yang disebabkan adanya kemampuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berbeda dan bervariasi di masing-masing daerah. Perkembangan hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan pada GDP per kapita antar provinsi (Tambunan, 2003).

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mendominasi aktivitas perekonomian di Indonesia dibandingkan dengan wilayah lainnya. Tingginya dominasi aktivitas ekonomi Pulau Jawa dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Indonesia, tentunya disebabkan kualitas sumberdaya di Pulau Jawa lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dominasi aktivitas ekonomi Pulau Jawa terhadap ekonomi nasional disajikan pada gambar 1.1.

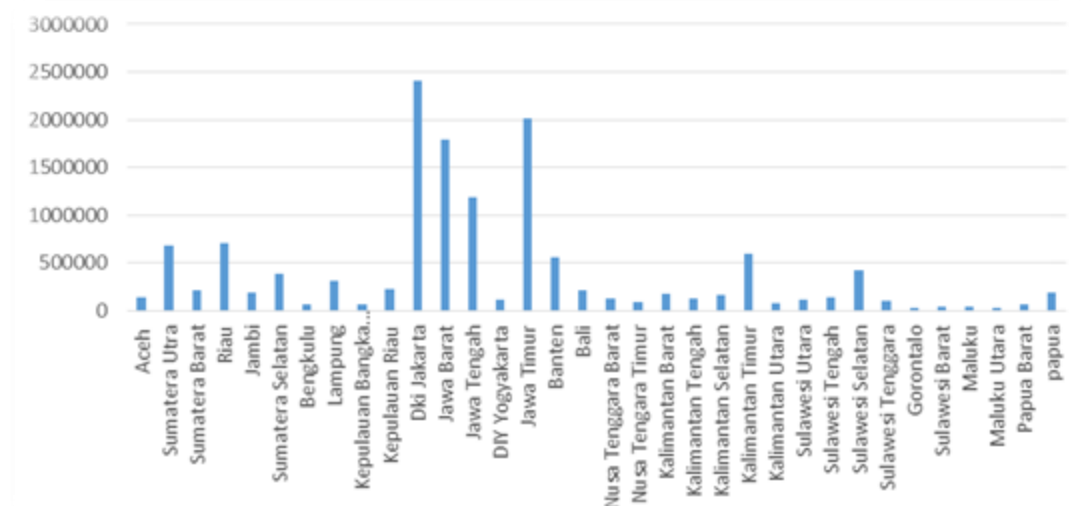


Gambar 1.1: PDRB Atas Dasar Harga Dasar Konstan (Miliar Rupiah) 2013–2017
Sumber: BPS Nasional, 2018

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dijeaskan bahwa aktivitas perekonomian nasional selama lima tahun terakhir didominasi oleh Pulau Jawa. Pada tahun 2013 PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 4.716.410 (miliar) dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi sebesar Rp. 5.857.268 (miliar). Penyumbang PDB nasional setelah Pulau Jawa adalah Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Tingginya nilai PDRB Pulau Jawa disebabkan karena Pulau Jawa menjadi pusat perekonomian dan administrasi negara. Selain itu, proses pembangunan pada masa orde baru yang bersifat sentralistik (terpusat) juga memberikan andil yang cukup besar terhadap tingginya PDRB di Pulau Jawa sehingga pada lima tahun terakhir, PDRB di Indonesia masih terjadi ketimpangan di Indonesia (Masruhin, 2009). Adapun dampak dari

ketimpangan tersebut membuat beberapa daerah tidak merasakan keadilan dalam proses pembangunan.

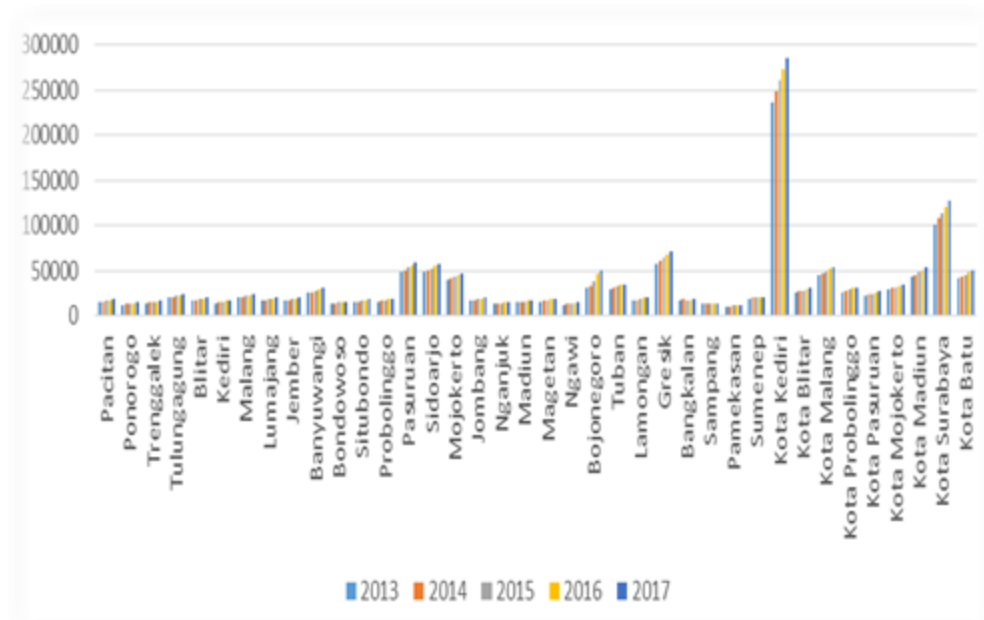
Perekonomian di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang PDB terbesar di Indonesia, sehingga peran Provinsi Jawa Timur tentu sangat signifikan dalam kancah perekonomian pusat (Mohtar, 2017). Tingginya PDRB Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dapat disajikan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2: PDRB Regional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (miliar rupiah) Tahun 2017
Sumber: BPS Nasional, 2018

Berdasarkan data pada Gambar 1.2 dapat dijelaskan bahwa PDRB Provinsi Jawa Timur terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta. PDRB atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Jawa Timur di tahun 2017 sebesar Rp 2.019.200 (miliar). Meskipun tingkat PDRB Provinsi Jawa Timur tinggi, proses pembangunan di Provinsi Jawa Timur masih belum dapat dipastikan bahwa pembangunan di wilayah tersebut merata. Hal tersebut terbukti, masih terdapat kesenjangan di setiap daerah di Jawa Timur. Hal ini dapat tercermin pada perkembangan PDRB per kapita kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur lima

tahun terakhir. Kabupaten dan kota yang memiliki kualitas industri yang tinggi memiliki PDRB per kapita yang tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3: Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Ribu Rupiah)

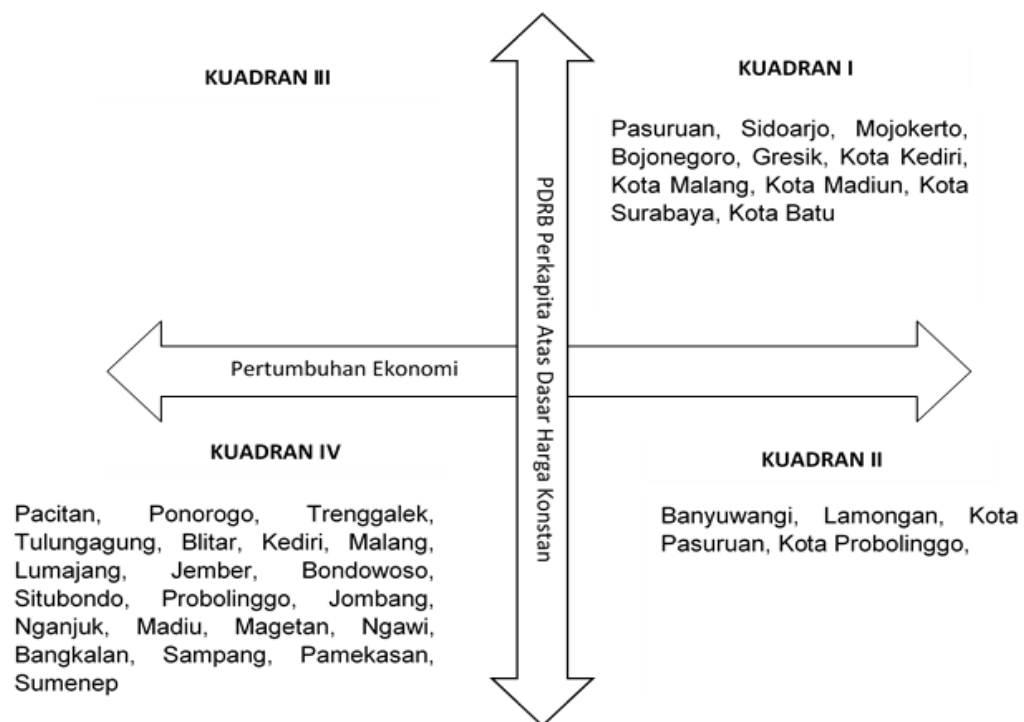
Sumber: BPS Jawa Timur, 2018

Berdasarkan data pada Gambar 1.3 dapat dijelaskan bahwa PDRB per kapita kabupaten dan kota di Jawa Timur tidak merata. Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki PDRB per kapita tinggi mayoritas daerah yang memiliki kualitas industri yang baik meliputi Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Bojonegoro, Gresik, Kota Kediri, Malang, Madiun, Surabaya, dan Kota Batu. Daerah tersebut memiliki rata-rata PDRB perkapita diatas Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar Rp 38.083.400,00. Adapun tiga daerah dengan PDRB per kapita tertinggi di Jawa Timur yaitu Kota Kediri sebesar Rp 285.021.700,00, Surabaya sebesar Rp 126.870.600,00 dan Gresik sebesar Rp 70.704.700,00.

PDRB per kapita dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang,

Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Blitar, Probolinggo, Pasuruan dan Mojokerto. Tiga daerah terendah PDRB per kapita di Jawa Timur adalah Ponorogo sebesar Rp 14.867.700,00, Sampang sebesar Rp 13.774.800,00 dan Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 11.947.000,00. Kabupaten Pamekasan menjadi daerah dengan PDRB per kapita terendah di Provinsi Jawa Timur. Apabila dibandingkan dengan Kota Kediri dan Surabaya, PDRB per kapita Kabupaten Pamekasan hampir 20 kali lipat dengan PDRB per kapita kedua daerah tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa terjadinya ketimpangan yang begitu tinggi antar setiap daerah di Provinsi Jawa Timur.

Pertumbuhan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan yang dicapai suatu daerah dan juga dapat menunjukkan sejauh mana daerah dapat memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan nantinya akan dapat mendukung proses percepatan pembangunan yang tentunya berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat yang merata. Pada Gambar 1.4 akan mendeskripsikan kondisi daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan metode tipologi klassen dengan membandingkan laju pertumbuhan ekonomi dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang bertujuan untuk mengetahui kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang tinggi dan rendah.



Gambar 1.4 Perbandingan Absolut (Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Sumber: BPS Jawa Timur, 2018

Kuadrant I merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita diatas Provinsi Jawa Timur yaitu 5,45% dan Rp 37.719.500. Kuadrant II merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi diatas Provinsi Jawa Timur dan dibawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur. Kuadrant III merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dibawah Provinsi Jawa Timur dan diatas PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur. Kuadrant IV merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita dibawah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dijelaskan bahwa mayoritas daerah di Provinsi Jawa Timur terletak pada kuadrant IV dengan jumlah 22 kabupaten. Daerah yang terletak di Pulau Madura yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep menjadi daerah yang terletak pada kuadrant IV. Pada

Kuadran I mayoritas daerah yang mempunyai sektor industri yang tinggi. Selain itu, daerah yang tergabung dalam kuadran I adalah daerah yang tergabung dalam pengembangan Kota Surabaya, yaitu GERBANGKERTASUSILA. Adapun daerah yang terletak pada kuadran I adalah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu. Pada kuadran II hanya terdapat empat daerah yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan.

Tingginya jarak antara kuadran I dan IV di masing-masing daerah tentunya akan mengakibatkan masalah ekonomi dan sosial seperti peningkatan urbanisasi pada kuadran I, II, III. Sebab, daerah pada kuadran tersebut memiliki daya tarik bagi para pendatang di kuadran IV dan akan munculah masalah-maslah baru dengan semakin banyaknya pendatang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Jawa Timur yang salah satu indikatornya adalah perbedaan PDRB per kapita yang dapat mencerminkan kondisi pendapatan masyarakat di suatu daerah.

Perbedaan pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang tentunya akan berdampak pada tidak meratanya pertumbuhan secara merata. Sehingga pertumbuhan akan semakin timpang (*divergence*). Namun, ketimpangan yang dialami pada suatu daerah akan dapat berkurang jika daerah yang memiliki tingkat PDRB per kapita yang rendah mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah PDRB per kapitanya yang tinggi. Hal tersebut tentunya dapat mengkerucutkan ketertinggalan (*gap*) suatu daerah akan semakin rendah dan tentunya akan berakibat pada kondisi yang konvergen. Sehingga

dengan demikian, perlu dilakukan uji konvergensi untuk mengetahui kondisi pembangunan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Solow dan Swan dalam model neo klasiknya menyatakan tingkat pertumbuhan ekonomi di dua daerah pasti terdapat perbedaan karena setiap daerah memiliki struktur ekonomi yang berbeda dalam hal jumlah modal, tenaga kerja dan efisiensi yang berbeda. Selain itu, beberapa penelitian mengenai studi konvergensi menggunakan faktor-faktor yang berbeda, namun pada intinya semua faktor-faktor tersebut mewakili kondisi ekonomi pada daerah tersebut.

Barro dan Sala'i Martin, (2004) menyatakan bahwa pengujian konvergensi terdapat dua perspektif dalam pengujian. Adapun dua perspektif pengujian tersebut adalah uji konvergensi sigma dan konvergensi beta. Uji konvergensi sigma merupakan uji konvergensi yang dilakukan dengan menentukan standart deviasi PDRB per kapita. Syarat terjadinya konvergensi sigma adalah berkurangnya dispersi pendapatan antar daerah. Uji konvergensi beta merupakan uji konvergensi yang terdiri dari uji konvergensi absolut dan uji konvergensi kondisional. Syarat terjadinya konvergensi beta adalah daerah miskin dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah kaya dalam hal PDRB per kapita atau output. Uji konvergensi beta juga dapat digunakan untuk mengetahui *speed of convergence* suatu daerah.

Menjadi penelitian yang menarik dalam pembahasan studi konvergensi di Provinsi Jawa Timur, sebab Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang PDB Nasional terbesar serta keragaman karakteristik antar daerah yang dimilikinya. Selain itu, dapat mengetahui eksistensi percepatan konvergensi yang terjadi di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur, karena penelitian tersebut

dapat menginformasikan kepada masyarakat bagaimana kondisi perekonomian di daerah mereka. Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengangkat topik dalam penelitian ini berjudul ***“Analisis Konvergensi Pendapatan Regional di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 – 2017”***

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana corak pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dalam periode tahun 200-2017 melalui uji konvergensi?
2. Bagaimana laju kecepatan konvergensi (*speed of convergence*) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam periode 2000 – 2017?

1.3 Batasan Masalah

Analisis konvergensi pendapatan yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada model neoklasik Solow dan Swan. Provinsi Jawa Timur salah satu penyumbang PDB terbesar di Indonesia, namun dalam pembangunan ekonomi di wilayah tersebut masih tidak merata. Sehingga perlu dilakukan pengujian konvergensi untuk mengetahui pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur semakin konvergen/divergen. Pengujian konvergensi tersebut dilakukan dua pengujian yaitu konvergensi sigma dan Uji konvergensi beta.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui corak pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dalam periode tahun 2000 – 2017.
2. Untuk mengetahui Mengetahui laju kecepatan konvergensi (*speed of convergence*) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2000 – 2017.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi, penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan studi ekonomi secara makro.
2. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini dapat memberikan informasi penting terkait dengan pengambilan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan agar dapat konvergen.
3. Bagi penelitian berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk melakukan kajian lebih lanjut khususnya dalam bidang konvergensi pendapatan.